



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke – 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Februari 2023
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.20 WIB s.d 12.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022; 2. Membahas program Kerja Tahun 2023; 3. Dan lain-lain
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: .... dari 57 orang Anggota Komisi V DPR RI secara fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Bina Konstruksi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Bina Konstruksi dan Kepala BPSDM Kementerian PUPR hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022, Membahas program Kerja Tahun 2023, dan lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Sekjen, Irjen, Dirjen Bina Konstruksi dan Kepala BPSDM Kementerian PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi, dan BPSDM Kementerian PUPR dalam APBN TA 2022:

a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2022 sebagai berikut:

No	Unit Organisasi Eselon I	Realisasi Keuangan TA 2022	Realisasi Fisik TA 2022
1.	Sekretariat Jenderal	97,29 %	99,82%
2.	Inspektorat Jenderal	99,22%	99,74%
3.	Ditjen Bina Konstruksi	96,30%	98,79%
4.	BPSDM	97,80%	100%

b. Terhadap program/kegiatan di TA 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi, dan BPSDM Kementerian PUPR agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2022, sehingga tidak terulang kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

2. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi, dan BPSDM Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

3. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi, dan BPSDM Kementerian PUPR untuk:

- a. meningkatkan pengelolaan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kerjasama dengan berbagai pihak.
- b. meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan intern demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan.
- c. melakukan evaluasi rutin terhadap proses lelang, utamanya pada kontrak di bawah 80% demi terwujudnya kualitas konstruksi yang baik.
- d. meningkatkan percepatan sertifikasi terampil bagi peserta yang mengikuti pendidikan vokasi.

4. Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat khusus terkait persoalan dan isu strategis yang ada di Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 14 Februari 2023

KETUA RAPAT,



LASARUS

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PUPR,



T. ISKANDAR

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PUPR,



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

DIRJEN BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PUPR,



YUDHA MEDIAWAN

KEPALA BPSDM  
KEMENTERIAN PUPR,



KHALAWI ABDUL HAMID